

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA

Muhammad Ali Al Ihsan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu

Email: maaihsan@gmail.com

corresponding mail author :maaihsan@gmail.com

***Abstract :** The purpose of this study is to determine the influence of the local revenue fund, for the results and other local revenue that the shah on the financial performance. The population in this research is Financial statement and budget Report of 34 provinces in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia with a Purposive Sampling technique where the samples were determined by the criteria of the population of the province numbered above 5.000.000,- the soul in 2020. The Data obtained is a combination of time series and cross section data dengan pooling data or combined models. From the results obtained partially each increase of 1 million KK will give rise to the PAD by 83 million, on the contrary will be a decrease in DBH amounted to 39 million and LPDYS 27 million. on the value of statistics in the picture seen is the PAD TO 6.30, DBH - 1,27, and LPDYS -0,26 with prob. PAD 0.00, DBH IS 0.21, LPDYS 0,80 it shows that with a significance level of 2% variables influence signifikan against KK while the PAD and DBH effect is not significant.*

Keyword : PAD, Funds For Yield And Other Income Area Shah, Financial Performance.

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari dari 34 Propinsi dan 416 Kabupaten dan 98 Kota dimana pembangunan regional yang dilaksanakan pemerintah dengan sistem desentralisasi telah berjalan 21 tahun, namun semua harapan belum mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks (Wicaksono, 2012). Berbagai permasalahan yang selama ini terjadi belum dapat dicarikan solusi yaitu tentang Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pusat (Hibzon, 2007). Dengan demikian terjadi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi hal yang masih saja menjadi kebutuhan daerah Distribusi dan formulasi dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat belum dapat menutup ketimpangan pembangunan di daerah (Nawawi, 2021), bahkan dalam beberapa hal memperlebar kesenjangan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal dilapangan lebih cenderung dipengaruhi oleh aspek politik dari pada aspek ekonomi. UU Nomor 23 Tahun 2014 telah merevisi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah hal ini belum menjadi solusi dalam tujuan otonomi daerah tersebut.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki 4 aspek yaitu : aspek politik, administrasi, fiskal dan ekonomi, sedangkan aspek yang lain masih menjadi kewenangan pusat (Saragih, 2014). Meskipun 4 kewenangan tersebut telah dimiliki oleh daerah akan tetapi kepala daerah tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan di daerahnya disebabkan hal-hal politik terlalu dominan dalam merumuskan rencana

pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah (LPDYS) merupakan variabel bebas yang akan diuji terhadap Kinerja Keuangan (KK) yang merupakan variabel terikat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh DAU, DBH dan LLPYS terhadap KK baik secara parsial dan simultan (Hasan, 2020).

PAD adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. LPDYS adalah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Lumbantoruan & Hidayat, 2014) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan in-tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen: *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar.

Menurut (Azwar, 2016), PDB dapat dipandang dalam dua hal. *Pertama*, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. *Kedua*, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

Menurut (Eliza, 2015) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Smith dan Todaro, 2004).

II. LANDASAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Berwulo et al., 2017; Dermawan, 2018). Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Berwulo et al., 2017). Pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (UU 23 2014 pasal 285).

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

UU 23 2014 pasal 289 DBH adalah bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari: a. pajak; b. cukai; dan c. sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan

(PBB); dan b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mustofa, 2012). Sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan (Abdullah Dahlan, 2020; Akuntansi et al., 2014).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah (LPDYS)

LPDYS adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Nasir, 2019).

4. Kinerja Keuangan (KK)

Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Saputra, Sandy Candra et al., 2018; Zuhri & Soleh, 2016). Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa pengukuran dalam rasio keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif causal. Umar (2008) desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen, dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Lokasi dalam penelitian adalah website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia (www.djpp.depkeu.go.id) data propinsi dalam wilayah Republik Indonesia, dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2015 - 2019. Sedangkan waktu penelitian yaitu selama 3 bulan (September 2020 - Nopember 2020). Data yang diperoleh adalah kombinasi antara time series dan data *cross section*. Data timeseries adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu dan data *cross section* yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik tertentu yang disebut dengan *pooling data* atau *combined model* (Kuncoro, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah secara statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melengkapi data dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI dengan skala rasio. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan Laporan realisasi anggaran dari 34 propinsi yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun teknik penentuan sample dilakukan dengan *Purposive Sampling* dimana sampel ditetapkan dengan kriteria penduduk propinsi yang berjumlah diatas 5.000.000,- jiwa pada tahun 2020. Dari

34 Propinsi yang ada hanya 13 propinsi yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sample.

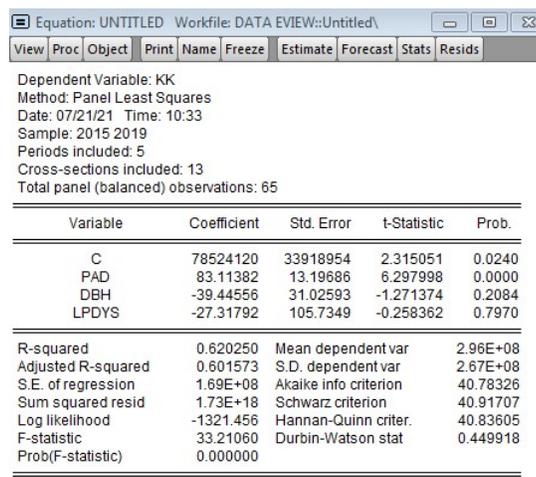
Tabel 1. Sample

No	Nama Propinsi	Penduduk	Sample
1	Sumatera Utara	15.851.851,-	s 1
2	Sumatera Barat	5.131.900,-	s 2
3	Riau	6.188.442,-	s 3
4	Sumatera Selatan	7.941.500,-	s 4
5	Lampung	8.026.191,-	s 5
6	DKI Jakarta	10.012.271,-	s 6
7	Jawa Barat	46.029.668,-	s 7
8	Jawa Tengah	33.522.663,-	s 8
9	Jawa Timur	38.610.202,-	s 9
10	Banten	11.704.877,-	s 10
11	Nusa Tenggara Timur	5.036.897,-	s 11
12	Sulawesi Selatan	8.432.163,-	s 12
13	Aceh	5.371.532,-	s 13

Sumber : Data BPS (2020)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan *evIEWS* metode ini disebut juga dengan istilah *pooled least square* sebagai alat estimasi paling dasar adalah dengan *common effect* yang mana model ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan juga dimensi individu atau *cross section*, sehingga bisa diasumsikan bahwa perilaku dari individu tidak berbeda didalam berbagai kurun waktu.



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	78524120	33918954	2.315051	0.0240
PAD	83.11382	13.19686	6.297998	0.0000
DBH	-39.44556	31.02593	-1.271374	0.2084
LPDYS	-27.31792	105.7349	-0.258362	0.7970

R-squared	0.620250	Mean dependent var	2.96E+08
Adjusted R-squared	0.601573	S.D. dependent var	2.67E+08
S.E. of regression	1.69E+08	Akaike info criterion	40.78326
Sum squared resid	1.73E+18	Schwarz criterion	40.91707
Log likelihood	-1321.456	Hannan-Quinn criter.	40.83605
F-statistic	33.21060	Durbin-Watson stat	0.449918
Prob(F-statistic)	0.000000		

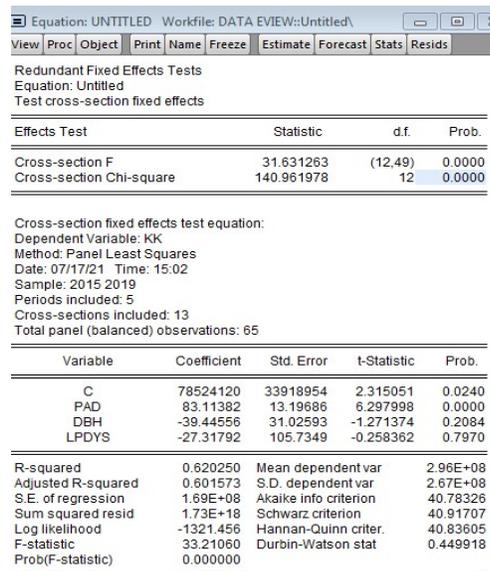
Gambar.1 Out Put *Common Effects* Regresi Data Panel Dengan *Evview*

Periode regresi data panel ini adalah tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah tahun yang di analisis adalah sebanyak 5 tahun dan sebanyak 13 propinsi yang ada di Indonesia sebagai sample, maka jumlah diobservasi sebanyak 65 terdiri dari satu variabel Y yaitu KK dan 3 variabel X yaitu PAD, DBH, LPDYS dan C sebagai residual dari persamaan regresi data panel ini. Pada hasil tersebut nilai R^2 0,620 diatas 0,5 yang menjelaskan bahwa variable PAD, DBH, LPDYS secara simultan cukup kuat menjelaskan variable KK dan sebesar 38 % dijelaskan oleh variabel lain.

Secara parsial setiap kenaikan 1 juta KK akan memberikan kenaikan kepada PAD sebesar 83 juta,

sebaliknya akan terjadi penurunan pada DBH sebesar 39 juta dan LPDYS 27 juta. pada nilai statistik pada gambar terlihat adalah PAD 6,30, DBH -1,27, dan LPDYS -0,26 dengan prob. PAD 0,00, DBH 0,21, LPDYS 0,80 hal menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 2% variabel berpengaruh secara signifikan terhadap KK sedangkan PAD dan DBH berpengaruh tidak signifikan.

Untuk menentukan pilihan berikutnya apakah realistis suatu model dimana propinsi tersebut kita ketahui memiliki pendapatan, sumber daya alam dan jumlah penduduk yang berbeda-beda akan tetapi kita menggunakan intercept yang sama untuk itu kita lakukan uji Chow. adalah Hasil *redundant fixed effect* ini akan dapat memberikan pilihan yang lebih tepat antara *pooled least square* dengan *Common Effect* atau *pooled least square* dengan *Fixed Effect* dengan Eview sebagai berikut :

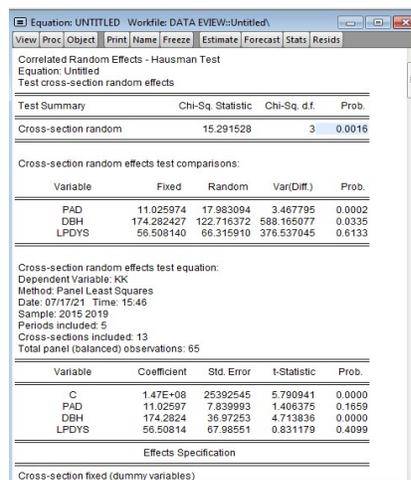


Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.631263	(12,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	140.961978	12	0.0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	78524120	33918954	2.315051	0.0240
PAD	83.11382	13.19686	6.297998	0.0000
DBH	-39.44556	31.02593	-1.271374	0.2084
LPDYS	-27.31792	105.7349	-0.258362	0.7970

Gambar.2 Hasil Chow Test Regresi Data Panel Dengan Eview

Dari gambar Chow Test berdasarkan nilai diatas adalah nilai Prob. Cross-section Chi-square sebesar 0.0000 < 0,05 maka kita akan memilih *fixed effect*.



Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.291528	3	0.0016

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	11.025974	17.983094	3.467795	0.0002
DBH	174.282427	122.716372	588.165077	0.0335
LPDYS	56.508140	66.315910	376.537045	0.6133

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.47E+08	25392545	5.790941	0.0000
PAD	11.02597	7.339993	1.486375	0.1459
DBH	174.2824	36.97253	4.713836	0.0000
LPDYS	56.50814	67.98551	0.831179	0.4099

Gambar.3 Hasil Hausman Test Regresi Data Panel Dengan Eview

Pengujian Hausman test ini digunakan untuk menentukan pilihan terhadap model *fixed effects* dan *randomeffects*, berdasarkan output Hausman Test dengan Eviews di atas, yaitu pada *Prob. Cross section random* valuenya sebesar 0,0016. Karena nilai Prob. 0,016 kurang dari 0,05 maka berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *fixed effects* dari pada *randomeffects*. Menurut Ghozali (2013:138) bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Dalam uji asumsi klasik ini digunakan uji *Durwin-Watson (DW)* karena tidak ada variabel lag. Dalam gambar 3 terlihat hasil dari nilai Durbin-Watson Stat yaitu sebesar 0,838667 yang merupakan DW hitung Sedangkan nilai dL 1,5035 dan dU 1,6960 berdasarkan hasil tersebut 0,838667 lebih kecil dari 1,5035 maka terdapat Auto korelasi positif dan 0,838667 lebih kecil dari $(4 - 1,5035) = 2,4965$ maka terdapat auto korelasi negatif berdasarkan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95 % terdapat autokorelasi positif dan negative pada gambar.5 terlihat Prob. Chi-Square < 0.05 maka terjadi gejala autokorelasi artinya kondisi sekarang sangat dipengaruhi oleh waktu yang lalu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Periode regresi data panel ini adalah tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah tahun yang di analisis adalah sebanyak 5 tahun dan sebanyak 13 propinsi yang ada di Indonesia sebagai sample, maka jumlah diobservasi sebanyak 65 terdiri dari satu variabel Y yaitu KK dan 3 variabel X yaitu PAD, DBH, LPDYS dan C sebagai residual dari persamaan regresi data panel ini.
2. Pada hasil tersebut nilai R^2 0,620 diatas 0,5 yang menjelaskan bahwa variable PAD, DBH, LPDYS secara simultan cukup kuat menjelaskan variable KK dan sebesar 38 % dijelaskan oleh variabel lain.
3. Secara parsial setiap kenaikan 1 juta KK akan memberikan kenaikan kepada PAD sebesar 83 juta, sebaliknya akan terjadi penurunan pada DBH sebesar 39 juta dan LPDYS 27 juta. pada nilai statistik pada gambar terlihat adalah PAD 6,30, DBH -1,27, dan LPDYS -0,26 dengan prob. PAD 0.00, DBH 0,21, LPDYS 0,80 hal menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 2% variabel berpengaruh secara signifikan terhadap KK sedangkan PAD dan DBH berpengaruh tidak signifikan.
4. Untuk menentukan pilihan berikutnya apakah realistis suatu model dimana propinsi tersebut kita ketahui memiliki pendapatan, sumber daya alam dan jumlah penduduk yang berbeda-beda akan tetapi kita menggunakan intercept yang sama untuk itu kita lakukan uji Chow. Berdasarkan nilai diatas adalah nilai Prob. Cross-section Chi-square sebesar $0.000 < 0,05$ maka kita akan memilih *fixed effect*.
5. Pengujian Hausman test ini digunakan untuk menentukan pilihan terhadap model *fixed effects* dan *randomeffects*, berdasarkan output Hausman Test dengan Eviews di atas, yaitu pada *Prob. Cross section random* valuenya sebesar 0,0016. Karena nilai Prob. 0,016 kurang dari 0,05 maka berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *fixed effects* dari pada *randomeffects*.
6. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Dalam uji asumsi klasik ini digunakan uji *Durwin-Watson (DW)* karena tidak ada variabel lag. Dalam gambar 3 terlihat hasil dari nilai Durbin-Watson Stat yaitu sebesar 0,838667 yang merupakan DW hitung Sedangkan nilai dL 1,5035 dan dU 1,6960 berdasarkan hasil tersebut 0,838667 lebih kecil dari 1,5035 maka terdapat Auto korelasi positif dan 0,838667 lebih kecil dari $(4 - 1,5035) = 2,4965$ maka terdapat auto korelasi negatif berdasarkan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95 % terdapat autokorelasi positif dan negative pada gambar. 5 terlihat Prob. Chi-Square < 0.05 maka terjadi gejala autokorelasi artinya kondisi sekarang sangat dipengaruhi oleh waktu yang lalu.

VI. REFERENCES

- Abdullah Dahlan, A. S. (2020). Universitas Malikussaleh. *Industrial Engineering*, 9(2), 211–220. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2014). *Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia*.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia* Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33.
- Dermawan, W. D. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 153–156. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.963>
- Eliza, Y. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah , Investasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat*. c.
- Hasan, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 100–109. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i1.104>
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 106–116.
- Lumbantoruan, E., & Hidayat, P. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 14780.
- Mustofa, -. (2012). Dana Bagi Hasil Dan Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia Periode Desentralisasi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 7(2), 119–134. <https://doi.org/10.21831/jep.v7i2.569>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nawawi, A. (2021). Analisis Respon Belanja Apbd Terhadap Transfer Tidak Bersyarat Dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), 41.
- Saputra, Sandy Candra, Suwendra, I Wayan, & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2, Bulan Oktober Tahun 2018, 4(2), 136–145.
- Saragih, J. P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Jurnal Politica*, 5(2), 200–224.
- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 94, 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>